

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan, yang berhubungan dengan kepemilikan institusional, komite audit dan kebijakan dividen. Penelitian yang pernah dilakukan (Permanasari & Suryanawa, 2018) yang memberi hasil bahwa variabel *Good Corporate Governance* tidak mampu memoderasi nilai perusahaan pada praktik perataan laba, dan yang menjadi penyebab adalah kuantitas dari proksi GCG belum menjamin kinerja yang baik bagi perusahaan sehingga tidak mampu memperlemah terjadinya praktik perataan laba diperusahaan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yang mengacu pada praktik perataan laba, dan variabel independen adalah nilai perusahaan dan *good corporate governance*. Dalam penelitian ini penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu membuat objek penelitian semain luas terkait segi bidang usaha, periode penelitian, maupun jumlah variabel penelitiannya yang dapat mempengaruhi variabel terikat seperti profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan variabel lainnya.

Penelitian yang dilakukan (Napitupulu et al., 2018) memberikan hasil bahwa variabel kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap praktek perataan laba. Akibatnya semakin bertambah saham kepemilikan institusional diperusahaan akan semakin meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi untuk dapat menurunkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen pada perusahaan. Sedangkan variabel komite audit tidak berpengaruh yang

signifikan terhadap perataan laba, karena komite audit tidak mampu untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan perataan laba. Dalam penelitian ini penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang periode pengamatan penelitian agar dapat hasil yang lebih akurat, menggunakan jenis perusahaan yang berbeda agar dapat dibandingkan tingkat perataan laba yang dilakukan, dan menambah beberapa variabel lain.

Penelitian yang dilakukan oleh (Handayani et al., 2016) menyatakan bahwa hasil yang diperoleh dalam penelitiannya variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap praktek perataan laba, dalam hal ini besar kecilnya presentase kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada praktik perataan laba. Sedangkan variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik perataan laba, hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah komite audit maka praktik perataan laba akan meningkat. Saran dalam penelitian ini untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar mendapat hasil yang akurat dengan menggunakan perusahaan yang berbeda sehingga dapat dibandingkan tingkat perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan dan menambahkan beberapa variabel.

Penelitian tentang *dividen payout ratio* terhadap praktik perataan oleh (Dewi, 2018) meneliti tentang profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *divident payout ratio* yang berpengaruh pada praktik perataan laba dengan struktur kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *divident payout ratio* berpengaruh negatif terhadap praktik perataan laba, karena *divident payout ratio* semakin rendah, maka praktik perataan laba semakin tinggi. Sehingga pembagian deviden akan memberikan sinyal positif kepada para investor

megenai penjualan saham yang mampu mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dalam penelitian ini penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah sektor perusahaan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, menambah periode penelitian dan menambah beberapa variabel lain.

Penelitian yang dilakukan oleh (Doraini & Wibowo, 2017) dapat dipakai sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi penulis. Rumusan masalah dalam penelitian ini : apakah ukuran perusahaan, kebijakan deviden, kinerja keuangan dan konvergensi IFRS perusahaan berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap praktik perataan laba. Variabel kebijakan divien (*divident payout ratio*) tidak berpengaruh terhadap *income smoothing* karena semakin besar deviden perusahaan maka akan semakin kecil perusahaan menggunakan *income smoothing*. Variabel profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *income smoothing* sehingga semakin besar profitabilitas perusahaan maka semakin rendah kemungkinan perusahaan menggunakan *income smoothing*.

2.2 Landasan Theory

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teory agensi (*agency theory*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam pembahasan perataan laba maupun konsep manajemen laba. Teori agensi ini mengatakan bahwa tindakan manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan

antara pemilik (principal) dan manajemen (agent) yang muncul ketika pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat keberhasilan perusahaan yang diinginkan. konflik kepentingan terjadi antara seorang manajer yang ingin memaksimalkan kekayaannya sendiri dengan pemegang saham.

Menurut Jensen & Meckling (1976) menggambarkan adanya hubungan keagenan yang timbul disebabkan kontrak yang ditetapkan antara principal yang menggunakan agent untuk pelaksanaan jasa yang menjadi kepentingan principal saat terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan control perusahaan. Terdapat dua bentuk hubungan keagenan, yaitu manajer dan pemegang saham. Manajer bertindak sebagai *agen* dan *principal* sebagai pemegang saham yang memiliki perbedaan kepentingan dalam pelaksanaan mencapai tujuan perusahaan. Manajer dan pemegang saham masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda dalam pemenuhan kepentingannya yang akan memunculkan konflik kepentingan. Dimana manajer menginginkan adanya pemberian intensif atau kompensasi yang sebesar-besarnya atas kinerja yang telah dilakukan pada perusahaan, sedangkan para pemegang saham lebih menginginkan pengembalian yang besar dan secepatnya dari investasi yang sudah ditanamkan dalam perusahaan.

Agen atau manajer sebagai pihak internal lebih mengetahui keadaan perusahaan dibanding pemilik yang tidak pernah mengelola perusahaan. Manajer dengan informasi yang dimiliki tersebut akan lebih mudah untuk melakukan *disfunctional behavior*, yakni menggunakan informasi tersebut untuk merubah atau memanipulasi laporan keuangan dalam upaya untuk memaksimalkan kemakmuran dan kesejahteraan pribadi. Teori keagenan mengimplikasikan adanya *asymetric information* antara pemegang

saham sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent*. Asimetri informasi muncul ketika manajemen lebih banyak mendapatkan informasi terkait perusahaan dibandingkan pemegang saham. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* akan membuat manajemen terdorong untuk melaporkan informasi perusahaan yang tidak sebenarnya kepada pemegang saham terutama informasi terkait laba perusahaan. Akibat adanya asimetri informasi tersebut memungkinkan manajemen melakukan tindakan yang dapat memaksimalkan keuntungan dirinya sendiri sehingga muncul konflik keagenan diantara keduanya. Dari konflik tersebut bisa menjadikan manajemen melakukan tindakan perataan laba dengan tujuan untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri.

Dalam mengelola perusahaan para pemegang saham akan memberikan wewenang kepada manajer untuk bertanggung jawab atas kepentingan pemegang saham, namun manajer terkadang tidak profesional dalam pengambilan keputusan. Manajer cenderung membuat keputusan agar dirinya mendapatkan bonus dan kompensasi manajerial. Perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dengan pemilik modal akan memunculkan adanya permasalahan antar kepentingan. Sebagai *agent* dari pemilik, manajemen seharusnya bertindak untuk kemakmuran pemilik, tetapi karena adanya resiko yang kemungkinan akan diterima oleh manajemen, maka dalam pengambilan keputusan mereka akan mempertimbangkan kepentingannya juga. Perbedaan ini yang akan memunculkan masalah-masalah keagenan.

Teori keagenan dalam perataan laba memiliki kepentingan yang bertentangan, dimana pihak manajemen berusaha melakukan perataan laba untuk kepentingannya sedangkan pemegang saham hanya tertarik pada pengambilan keuangan dari investasi

mereka pada perusahaan tersebut. Tindakan perataan laba dapat merugikan para investor karena investor tidak mengetahui posisi dan fluktuasi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perataan laba dapat terjadi karena dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* yang muncul akibat semua pihak berusaha mempertahankan tingkat kemakmuran masing-masing yang dikehendaki. Manajer sebagai pihak internal lebih tahu bagaimana kondisi perusahaan daripada pemilik perusahaan. Manajer juga lebih memiliki kesempatan dalam melakukan tindakan perataan laba karena informasi tentang perusahaan yang lebih banyak didapatkan oleh manajer daripada pemilik perusahaan atau pemegang saham.

2.2.2 Perataan Laba

Perataan laba merupakan sebuah fenomena yang kerap terjadi sebagai upaya manajemen dalam pengurangan fluktuasi laba yang akan dilaporkan. Tindakan perataan laba akan menjadi penyebab informasi mengenai laba yang telah dilaporkan sebelumnya menjadi menyesatkan bagi pihak investor. Informasi mengenai laba yang menyesatkan akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak eksternal. Perataan laba (*income smoothing*) adalah strategi yang banyak digunakan oleh para manajer perusahaan untuk merekayasa atau merubah laporan keuangan yang akan disajikannya. Perataan laba juga dapat dikatakan sebagai fenomena yang digunakan manajemen untuk mengurangi variabilitas labanya selama periode tertentu atau dalam satu periode, yang terarah pada tingkat yang diharapkan atas laba yang dilaporkan. Upaya pengurangan fluktuasi laba adalah bentuk manipulasi

laba agar menghasilkan jumlah laba dalam suatu periode tidak terlalu berbeda dengan jumlah laba pada periode sebelumnya.

Tindakan yang disengaja dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam upaya mengurangi fluktuasi laba dengan cara memindahkan pendapatan yang tinggi dari suatu periode keperiode selanjutnya adalah disebut sebagai praktek perataan laba. Ada dua cara manajemen perusahaan dalam mengelola labanya yang tergantung dari situasi yang terjadi di perusahaan. Jika laba sebenarnya lebih besar dari laba yang diharapkan, maka manajemen perusahaan akan memperkecil laba yang dilaporkan. Sebaliknya, Jika laba sebenarnya lebih kecil dari laba yang diharapkan, maka manajemen perusahaan akan memperbesar laba saat pelaporan. (Permanasari & Suryanawa, 2018).

Banyak hal yang menjadi pendorong manajemen untuk melakukan tindakan perataan laba salah satunya adalah perhatian investor yang cenderung terpusat pada informasi laba tanpa memperhatikan proses yang digunakan untuk mencapainya. Sehingga manajer menjadikan hal ini sebagai peluang untuk melakukan tindakan perataan laba dengan tujuan untuk menstabilkan laba sesuai dengan kepentingannya sehingga mampu menarik perhatian para investor. Namun perataan laba yang dilakukan oleh manajemen dapat menyebabkan pelaporan laba dalam laporan keuangan tidak akurat dan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya bahkan terkesan menyesatkan para investor yang kan menanamkan sahamnya pada perusahaan. Hal tersebut berakibat pada investor yang tidak memiliki banyak informasi terkait laba perusahaan yang menyebabkan pihak investor salah dalam menafsirkan dan menganalisis risiko berinvestasi.

2.2.3 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan suatu mekanisme pengawasan terhadap internal perusahaan yang memiliki tujuan menyelaraskan kepentingan *principal* dengan *agent*. *Good Corporate Governance* diperlukan dalam perusahaan untuk mencegah tindakan manajemen laba atau perataan laba yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Yang menjadi tujuan utama dilakukan penerapan *good corporate governance* pada suatu perusahaan adalah untuk menciptakan sistem keseimbangan dan pengendalian guna untuk mencegah adanya penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap menjadi pendorong dalam upaya pertumbuhan perusahaan. Peningkatan return perusahaan seringkali menimbulkan konflik, dimana konflik tersebut sering disebut dengan *agency problem*. Adanya konflik inilah yang mengakibatkan perbedaan kepentingan antara dan pemegang saham manajer. Teori agensi mengasumsikan bahwa pemicu terjadinya konflik agensi adalah adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Cadbury Commitee pertama kali memperkenalkan *Good Corporate Governance* pada tahun 1992 yang mendefinisikan bahwa dalam laporan mereka yang dikenal sebagai *Cadbury Report*, *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mempunyai fungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan perusahaan untuk bisa mencapai keseimbangan antara kekuatan serta wewenang perusahaan dalam memberikan pertanggung-jawaban khususnya kepada *shareholders*, dan *stakeholder* pada umumnya.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 mendefinisikan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu

proses atau struktur yang digunakan oleh BUMN sebagai tujuan dalam meningkatkan keberhasilan perusahaan dalam mewujudkan nilai pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, dimana penerapannya dilandasi oleh peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku.

2.2.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah pemegang saham perusahaan oleh institusi berbadan hukum, pemerintah, institusi keuangan, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Saham yang dimiliki oleh institusi ini dapat mempengaruhi jalannya perusahaan dengan baik hak voting yang mereka miliki dalam proses pembuatan keputusan perusahaan, baik keputusan investasi maupun keputusan hutang.

Sedangkan Jensen Meckling (1976) memberi pernyataan bahwa kepemilikan institusional mempunyai peran penting dalam meminimalisasi terjadinya masalah keagenan antara pihak pemegang saham dengan pihak manajer. Kepemilikan institusional yang ada dalam suatu perusahaan akan menjadi pendorong dalam peningkatan pengawasan kinerja manajemen perusahaan. Jika kepemilikan institusional semakin besar maka akan semakin besar juga kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dalam upaya menyelaraskan kepentingan pemegang saham atau *stakeholder* dengan manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan (Rizki et al., 2019).

2.2.5 Dewan Komisaris Wanita (Gender)

Gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara pria dan wanita dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku,

mentalitas, emosi, serta faktor-faktor *nonbiologis* lainnya. *Gender* memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. *Gender* dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya (Marzuki 2006 dalam Novilia & Nugroho, 2016).

Diversitas *gender* atau keragaman gender dalam penelitian ini diproksikan dengan keberadaan wanita dalam jajaran dewan komisaris. Keberadaan wanita dalam jajaran dewan komisaris menandakan bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang tanpa ada diskriminasi. Wanita dinilai memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari resiko, dan lebih teliti dibandingkan dengan pria. Perbedaan *gender* yang ada dalam tatanan dewan komisaris bisa mempengaruhi kebijakan yang diambil dan ada manfaat yang diberikan kepada perusahaan seperti alternatif dalam pengambilan suatu keputusan mengingat ada perbedaan sifat dalam bertindak. Perbedaan *gender* dalam penelitian ini lebih mengarah bagaimana peran wanita yang ada dalam anggota dewan komisaris bisa mengatasi terjadinya praktik manajemen laba. (Putri, 2019).

Sifat dasar wanita yang lebih konservatif, lebih berhati-hati lebih memiliki standar etika yang tinggi merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab hubungan negatif antara keberadaan wanita dalam jajaran top manajemen dengan manajemen laba. Dengan demikian, keanggotaan wanita dalam dewan komisaris dapat diharapkan akan mampu menurunkan tingkat pelanggaran aturan laporan keuangan (Maula & Rakhman, 2018).

2.2.6 Komite Audit

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) dalam Pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia menyatakan bahwa komite audit merupakan sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu dan melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan dan klien yang mempunyai tanggung jawab dalam membantu anggota auditor untuk mempertahankan independensinya dari manajemen (Herdiana, 2013).

Komite audit merupakan suatu komite dalam perusahaan yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi setiap proses penyusunan dan pelaporan keuangan, mengamati sistem pengendalian internal (termasuk auditor internal), dan mengawasi auditor eksternal. Keputusan Bapepam Nomor KEP-643/BL/2012 menyatakan bahwa komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam upaya untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit bekerja secara independen dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Dimensi pengukuran komite audit adalah dengan mengukur banyaknya jumlah anggota komite audit di perusahaan (Azhari & Nuryatno, 2019). Proses untuk melaksanakan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik adalah peran yang cukup penting oleh komite audit.

2.2.7 Kebijakan Deviden

Kebijakan deviden merupakan kebijakan yang ditetapkan perusahaan untuk mengatur jumlah deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham. Besarnya deviden yang

dibagikan sesuai dengan proposional saham yang dibeli oleh para pemegang saham (*stakeholder*). Dalam penentuan kebijakan dividen nilai perusahaan sangat berpengaruh bagi para investor. Semakin besar dividen yang dibagikan maka margin/keuntungan yang diperoleh perusahaan pada periode tersebut dapat dikatakan tinggi. Hal ini yang akan menjadi nilai tambah dan juga daya tarik tersendiri bagi perusahaan agar di periode selanjutnya keinginan masyarakat dalam berinvestasi dalam perusahaan tersebut dapat meningkat (Hafizah, 2017).

Yang menjadi daya tarik para investor adalah dividen yang besar dapat menambah pendapatan atau keuntungan yang akan didapatkan oleh para investor. Hal ini karena kebijakan dividen adalah kebijakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk pembagian dividen pada periode tertentu, perusahaan sebisa mungkin membagikan dividen dalam jumlah yang besar kepada para investor untuk menarik minat investor dalam masalah penanaman modalnya. Semakin kecil *dividen payout ratio* perusahaan akan semakin terdorong melakukan praktik perataan laba untuk menarik para investor dalam berinvestasi karena dividen yang dibagikan oleh perusahaan (Doraini & Wibowo, 2017).

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 kepemilikan institutional terhadap tindakan perataan laba

Kepemilikan saham yang besar oleh pihak institutional yakni salah satu mekanisme untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan. Dalam teori agensi menyatakan bahwa terdapat konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Dimana manajer menginginkan hasil keuntungan sebanyak-banyaknya, sedangkan pemegang

saham menginginkan kesejahteraannya terjamin. Kepemilikan institutional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya.

Kepemilikan institutional mempunyai peran penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu mengawasi setiap keputusan yang akan diambil oleh para manajer secara efektif dan bisa memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang oportunistik. Pemegang saham institutional bisa mengimbangi informasi yang dimiliki oleh manajemen berdasarkan atas kepemilikan saham yang relatif signifikan, sehingga asimetri informasi yang terjadi antara manajemen dan pemilik rendah. Kepemilikan saham institusi yang tinggi diharapkan dapat menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer yang bisa merugikan semua pihak.

Tindakan pengawasan perusahaan yang dilakukan oleh kepemilikan institutional bisa mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri. Dalam penelitian Suhendi dan Zaenudin (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institutional tidak dapat mengurangi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu et al., (2018) memberikan hasil penelitiannya bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap perataan laba. Dari penjelasan diatas maka akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : kepemilikan institutional berpengaruh terhadap tindakan perataan laba.

2.3.2 Dewan Komisaris terhadap Tindakan Perataan Laba

Dewan komisaris adalah organ dalam suatu entitas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap dewan direksi serta memastikan *corporate governance* terlaksana dengan baik (Novilia & Nugroho, 2016). Tugas dan tanggung jawab tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kualitas laba dari perusahaan karena dewan komisaris akan mengarah kebijakan yang akan diambil oleh dewan direksi yang berhubungan dengan kepentingan semua pihak.

Penelitian (Putri, 2019) memberikan hasil dalam penelitiannya bahwa dewan komisaris wanita berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba sifat yang konservatif, lebih menghindari risiko, dan memiliki etika yang tinggi yang menjadi salah satu faktor adanya hubungan negatif antara keberadaan wanita dengan praktik manajemen laba. Wanita diharapkan ada dalam anggota dewan komisaris satu entitas agar bisa meminimalisir perilaku kecurangan termasuk tindakan perataan laba. Penelitian yang dilakukan (Novilia & Nugroho, 2016) menyatakan hasilnya bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tindakan perataan laba. Sehingga baik pria maupun wanita yang menduduki posisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Dari penjelasan diatas maka akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Dewan Komisaris wanita berpengaruh terhadap Tindakan perataan laba

2.3.3 Komite Audit terhadap Tindakan Perataan Laba

Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dalam penerapan good corporate governance di perusahaan. Komite audit akan memantau setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer, sehingga akan mempersempit ruang gerak manajer dalam melakukan tindakan perataan laba. Dengan adanya anggota komite audit yang lebih dari satu, maka anggota audit bisa berkolaborasi dan bekerja sama dalam peningkatan pengawasan terhadap aktivitas dewan direksi, jumlah komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 anggota, diantaranya adalah komisaris independen yang bertugas sebagai ketua komite audit, sedangkan dua anggota lainnya merupakan pihak independen dari luar perusahaan yang memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan.

Komite audit mempunyai tanggung jawab pengawasan dalam proses pelaporan keuangan perusahaan dengan tujuan utamanya yakni meningkatkan kredibilitas laporan yang diaudit. Dalam penelitian (Handayani et al., 2016) mengatakan bahwa komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit internal, dan mengamati sistem pengendalian internal, dengan ini akan dapat mengurangi sifat oportunistik manajemen yang melakukan tindakan perataan laba dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.

Penelitian yang dilakukan (Marfuah, 2019) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh komite audit terhadap perataan laba. Keberadaan komite audit dalam perusahaan belum mampu melakukan fungsi monitoring terhadap kinerja manajemen sehingga belum mampu membatasi perataan laba. Penelitian yang

dilakukan (Handayani et al., 2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik perataan laba. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. Koefisien negatif dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin rendah komite audit suatu perusahaan maka akan semakin meningkat tindakan praktik perataan laba. Karena pelaksanaan tugasnya, komite audit dengan proporsi anggota eksternal yang cukup besar dengan pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan pada perusahaan dan laporan keuangannya, dengan hal ini akan dapat mengurangi praktik perataan laba. Dari penjelasan diatas maka akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : komite audit berpengaruh terhadap tindakan perataan laba

2.2.4 Kebijakan Dividen terhadap Tindakan Perataan Laba

Kebijakan dividen adalah suatu keputusan perusahaan yang digunakan dalam menentukan apakah laba yang dihasilkan perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan sebagai laba ditahan perusahaan guna untuk pembiayaan investasi di masa mendatang. Kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk membagikan laba atau menahannya sebagai investasi kembali di dalam perusahaan.

Perusahaan yang menerapkan kebijakan dividen dengan tingkat dividen payout ratio yang tinggi akan memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang menerapkan kebijakan tingkat dividen payout ratio rendah jika perusahaan mengamali fluktuasi laba. Perusahaan yang menerapkan kebijakan dividen payout ratio yang tinggi akan cenderung ingin melakukan tindakan perataan laba

dibandingkan dengan perusahaan yang menerapkan kebijakan tingkat dividen payout ratio yang rendah.

Perusahaan yang menerapkan *dividen payout ratio* tinggi akan mendapatkan persepsi dari investor bahwa perusahaan dapat memberikan tingkat penegmbalian yang tinggi dan akan menarik minat investor dalam menanamkan modalnya. Akan tetapi, jika perusahaan mengalami fluktuasi laba maka akan menyebabkan dividen payout ratio juga mengalami fluktuasi. Jika terjadi dividen yang dibagikan rendah maka akan menyebabkan investor memindahkan sahamnya ke perusahaan lain. Besar kecilnya dividen tergantung oleh besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan, sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan tindakan praktik perataan laba. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar dividen yang diterima oleh perusahaan maka akan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan tindakan perataan laba.

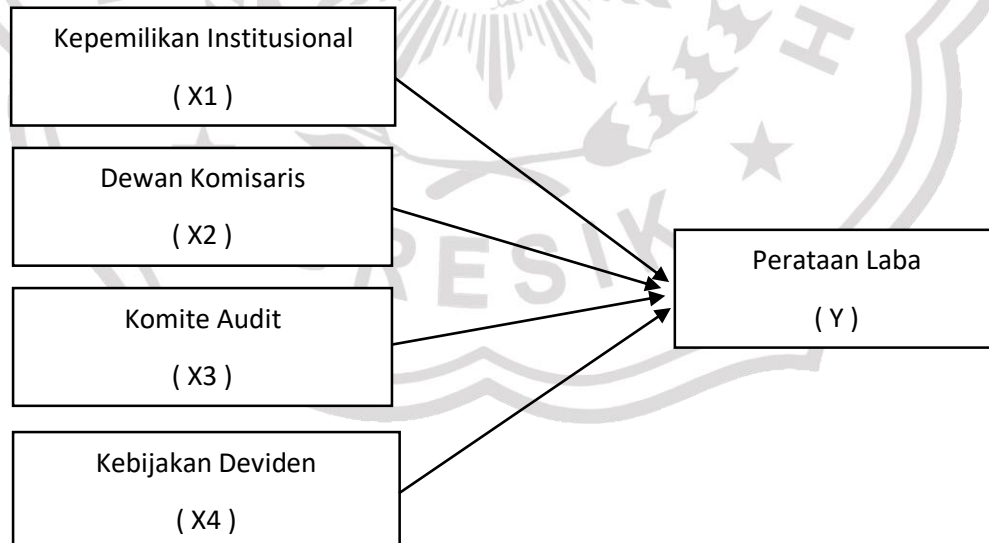
Penelitian yang dilakukan (Dewi, 2018) menyatakan bahwa dividen payout ratio berpengaruh negatif terhadap praktik prataan laba. Hal ini disebabkan karena dividen payout ratio semakin rendah, maka praktik perataan laba semakin tinggi, sehingga pembagian dividen akan memberikan sinyal positif kepada para pemegang saham mengenai penjualan saham yang mampu mengindikasikan kemampuan perusahaan. Penelitian Dahayani et al. (2017) memberikan hasilnya bahwa kebijakan deviden berpengaruh negatif dan signifikan pada manajemen laba perusahaan yang berarti semakin tinggi *Divident Payout Ratio* (DPR) maka manajemen perusahaan akan semakin melakukan manajemen laba.

Dari penjelasan diatas maka akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Kebijakan dividen berpengaruh terhadap praktik perataan laba.

2.4 Kerangka Konseptual

Perataan laba merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menghindari fluktuasi laba. Sehingga investor memiliki kepercayaan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Namun, tidak semua pendapat menyatakan setuju terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Karena sebagian mereka yang tidak setuju menganggap bahwa dengan melakukan tindakan perataan laba berarti perusahaan tersebut memanipulasi data dari laporan keuangan. Pemilihan variabel dalam penelitian ini mengacu pada latar belakang penelitian yang menjelaskan bahwa manajemen laba timbul karena adanya dampak dari masalah keagenan yang menyebabkan konflik antara *principal* dan *agent*. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan kepentingan antara *principal* dan *agent* yaitu dengan membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang baik pada perusahaan. kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam gambar berikut ini :



Kerangka Konseptual Gambar 2.1

Penelitian ini memiliki empat variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Kepemilikan institusional sebagai variabel independen pertama (X1), dewan komisaris sebagai variabel ketiga (X3), komite audit sebagai variabel kedua (X3), dan kebijakan deviden sebagai variabel ketiga (X4). Sedangkan perataan laba sebagai variabel dependen (Y). Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor terjadinya tindakan perataan laba.



